



LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN JUNI TAHUN 2026



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak,S.E.,M.M. Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P. Namantus Gwijangge, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo,S.Pd Yaberius Kogoya, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M. Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si Timmi Gurik,SH.,M.TH.
Staff PPNP BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP. Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan.....	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan.....	9
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si	17
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	18
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)	24
BAB III PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

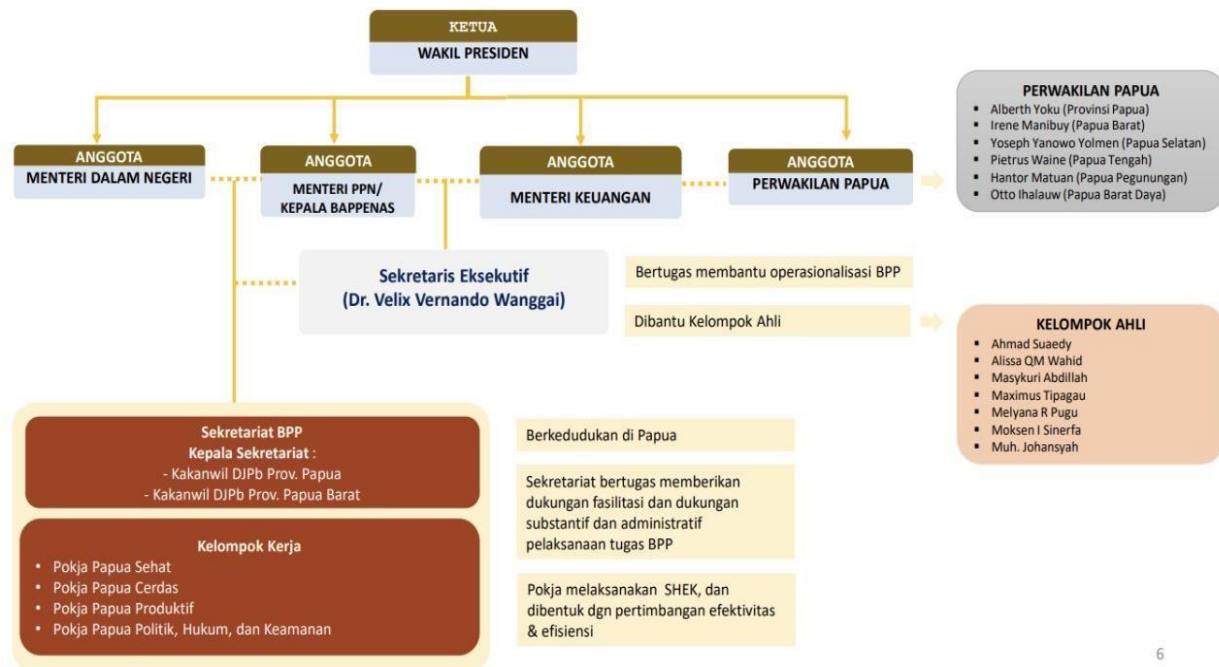
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



6

1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

- Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II

PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Bulan Juni tahun 2026 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan,S.IP.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	
Rencana Tindaklanjut	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Fransiscus Elosak, S.E.,M.M., Dafrin Muksin,S.IP., M.I.P., Namantus Gwijangge,S.IP.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Pendampingan dan Narasumber Diskusi Panel dengan tema Injil Masuk di Minimo Lembah Balim: Merawat Warisan Iman, Mendorong Inovasi, dan Memperkuat Persatuan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2026, bertempat di Kampung Minimo, Distrik Maima Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Merefleksikan peristiwa masuknya Injil di Kampung Minimo, Lembah Baliem, sebagai momentum masuknya Injil di Papua Pegunungan sebagai warisan iman, memperkuat persatuan masyarakat, serta mendorong inovasi pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Papua Pegunungan • Mengidentifikasi Permasalahan dan Mengevaluasi Pembangunan Kawasan Wisata Religi Kampung Minimo dan perayaan Injil Masuk yang diperingati pada setiap tanggal 20 April.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Pokja Polhukam, kelompok perempuan Minimo, Kelompok Adat, Kelompok Sejarawan, Kelompok Intelektual, dan APS Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	• Diperlukan perhatian pemerintah untuk memperhatikan situs sejarah Masuknya Injil pertama di Papua Pegunungan yang berada di Kampung Minimo. • Mendorong Pemerintah untuk mengembangkan Minimo sebagai wilayah wisata religi • Tanggal 20 April telah ditetapkan sebagai Hari Libur Fakultatif Perayaan Masuknya Injil di Papua Pegunungan, namun belum ada regulasi yang mengatur tentang tatacara dan pengelolaan perayaan masuknya Injil di Papua Pegunungan • Minimo sebagai simbol agama yang menjadi kunci ataupun Fondasi Perdamaian di Wilayah Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengembangkan Situs Sejarah Masuknya Injil di Kampung Minimo sebagai kawasan cagar budaya dan religi yang dilindungi. • Diperlukan regulasi daerah melalui Perdasus yang mengatur tata cara, pelaksanaan, dan pengelolaan Perayaan Hari Masuknya Injil setiap tanggal 20 April sebagai hari libur fakultatif di Papua Pegunungan.

		Diperlukan sinkronisasi pembangunan dengan melibatkan pemerintah, gereja, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi dan Pembahasan Agenda Strategis Antara Sekretariat BPP Provinsi Papua Pegunungan dan Pokja Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026, bertempat di Ruang Rapat Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Mengidentifikasi perkembangan terbaru sengketa antara Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. • Mengkaji aspek hukum terkait putusan pengadilan dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. • Membahas rencana audiensi Asosiasi Kepala Desa kepada BPP Provinsi Papua Pegunungan. • Mengkaji kewenangan lembaga yang berwenang terkait usulan penghentian atau penundaan penyaluran Dana Desa. • Merumuskan langkah-langkah strategis BPP Provinsi Papua Pegunungan dalam menjalankan fungsi pengawasan, fasilitasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Sekretarian BBP Provinsi papua Pegunungan dan Pokja Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	• Sekretariat BPP Provinsi Papua Pegunungan memberikan gambaran umum sengketa pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Yahukimo. • Menyepakati untuk melaksanakan audiensi bersama Asosiasi Kepala Desa kepada BPP Provinsi Papua Pegunungan

		• Sekretariat BPP Provinsi Papua Pegunungan memberikan dokumen sengketa sebagai bahan kajian Pokja Polhukam guna melakukan pengkajian dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan tugas Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi dengan lembaga terkait.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Melakukan kajian terhadap dokumen sengketa pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Yahukimo yang disampaikan oleh Sekretariat BPP Provinsi Papua Pegunungan. • Memfasilitasi dan mengikuti audiensi antara Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Yahukimo dengan BPP Provinsi Papua Pegunungan untuk memperoleh informasi dan aspirasi para pihak. • Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh data dan klarifikasi yang diperlukan. • Menyusun kajian, telaahan, dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Anggota BPP dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi penyelesaian sengketa
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Audiensi dan Penyerapan Aspirasi Asosiasi Kepala Kampung Kabupaten Yahukimo
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026, bertempat di Kantor KPPN Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Kegiatan Audiensi dan Penyerapan Aspirasi Asosiasi Kepala Kampung Kabupaten Yahukimo bertujuan untuk menyerap berbagai aspirasi, masukan, serta permasalahan yang dihadapi kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kampung. • Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kepala kampung, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait

		guna mencari solusi serta merumuskan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan kampung yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mendukung stabilitas pemerintahan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Yahukimo.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Kepala KPPN Wamena, Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Jayawijaya, Perwakilan Asosiasi Kepala Kampung Kabupaten Yahukimo, BPP Pokja Papua Polhukam dan Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	- Asosiasi Kepala Kampung Kabupaten Yahukimo menyampaikan masukan dan aspirasi terkait permasalahan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung di Kabupaten Yahukimo. - Penyampaian aspirasi untuk penghentian penyaluran Dana Desa untuk seluruh kampung di Kabupaten Yahukimo (sebanyak 510 Kampung), sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 174 PK/TUN/2023.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh Asosiasi Kepala Kampung. - Melakukan kajian terhadap permasalahan pemerintahan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Menyusun rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan yang ada. - Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut hasil audiensi guna mendukung stabilitas pemerintahan dan pembangunan kampung di Kabupaten Yahukim
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Kelembagaan Bersama Kejaksaan Negeri Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, memperoleh masukan serta informasi strategis terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat, serta membangun kerja sama dalam upaya menjaga stabilitas pemerintahan, ketertiban umum, dan mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten jayawijaya, BPP Pokja Polhukam, BPP Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan Koordinasi Kelembagaan bersama Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Kasi Intel telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi serta pertukaran informasi terkait berbagai isu strategis di daerah. Selain itu, diperoleh masukan dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan, serta terbangun komitmen bersama untuk mendukung stabilitas pemerintahan, penegakan hukum, dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Kasi Intel dengan memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi, melakukan koordinasi berkala terhadap isu-isu strategis yang berkembang di daerah, serta menyusun langkah-langkah kolaboratif dalam mendukung stabilitas pemerintahan, penegakan hukum, dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua Pegununga
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Sosialisasi Bersama Wakil Rektor III Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, bertempat di Ruang Wakil Rektor III Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi bersama Wakil Rektor III Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena bertujuan untuk memperkuat sinergi antara BPP-Pokja Papua Polhukam dengan perguruan tinggi dalam mendukung terciptanya stabilitas politik, hukum, dan keamanan di wilayah Papua Pegunungan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu strategis daerah, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendorong partisipasi aktif civitas akademika dalam menjaga ketertiban, persatuan, dan kondusivitas lingkungan kampus maupun masyarakat..
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu BPP Pokja Polhukam, BPP Pokja Papua Cerdas, dan Wakil Rektor III UNAIM Yapis Wamena
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi bersama Wakil Rektor III Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama antara Pokja Polhukam dan pihak universitas dalam mendukung stabilitas politik, hukum, dan keamanan di Papua Pegunungan. Selain itu, diperoleh masukan terkait peran mahasiswa dan perguruan tinggi dalam menjaga kondusivitas daerah, meningkatkan wawasan kebangsaan, serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang aman, tertib, dan harmonis.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Meningkatkan kerja sama antara Pokja Polhukam dan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan, pendidikan politik, dan kesadaran hukum guna mendukung stabilitas dan kondusivitas daerah. • Melakukan koordinasi secara berkala serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diskusi bersama mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu politik, hukum, keamanan, dan wawasan kebangsaan di Papua Pegunungan.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Pokja Papua Polhukam Menghadiri Pembukaan Kegiatan UNA'IM Competition 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, bertempat di Lapangan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian dari proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. • Membangun karakter, disiplin, tanggung jawab, membangun semangat kebersamaan dan persaudaraan antar mahasiswa lintas Perguruan Tinggi. • Membangun mental juara, meningkatkan rasa percaya diri, melatih kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, serta menghadapi tantangan secara positif di kalangan Mahasiswa.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Para Pimpinan UNAIM Yapis Wamena, Dosen, Perwakilan Kapolres Jayawijaya, Mahasiswa, Ketua SPPG Probinsi Papua Pegunungan, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Polhukam
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	• Pembukaan Kegiatan UNA'IM Competition 2026 berjalan baik dan lancar. Dalam penyampaian Wakil Rektor III Unaim Yapis Wamena bahwa dalam kegiatan tersebut dibuka berbagai cabang lomba akan digelar selama pelaksanaan Kompetisi UNA'IM, melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas di lingkungan Universitas Amal Ilmiah UNA'IM Yapis Wamena dan Perguruan Tinggi Lain Yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan antar mahasiswa, meningkatkan semangat kolaborasi, dan menumbuhkan budaya kampus yang sehat, aktif, serta produktif.

		• Penyelenggaraan Kompetisi UNA'IM sejalan dengan komitmen Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena dalam mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Komitmen tersebut juga sejalan dengan upaya kampus untuk mencetak lulusan yang memiliki keseimbangan antara prestasi akademik, keterampilan, kepemimpinan, dan karakter.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi guna memperkuat pembinaan wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, dan nilai-nilai toleransi di kalangan mahasiswa. • Memetakan potensi permasalahan sosial, konflik, dan isu keamanan di lingkungan kampus. • Mendorong pelaksanaan kegiatan edukasi, dialog kebangsaan, dan penguatan karakter mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan

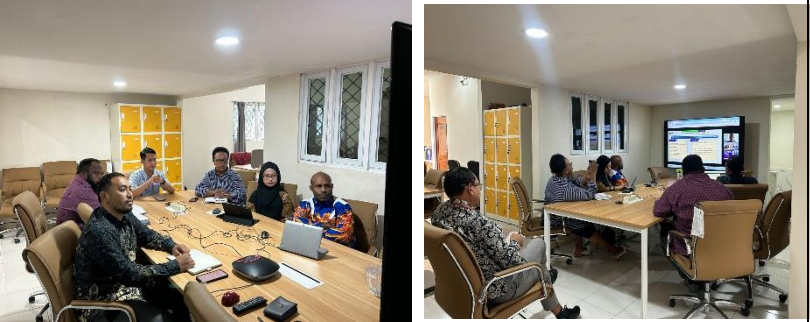
Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto,S.Sos.,M.Si, Timmi Gurik

Kegiatan		
Nama Kegiatan	:	NIHIL
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan

Paul Wetipo, S.Pd., Yaberius Kogoya, S.IP.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Pengarahan Hak dan Kewajiban serta Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokja BPP
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026, bertempat di Kantor Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Meningkatkan pemahaman anggota Kelompok Kerja (Pokja) mengenai hak, kewajiban, peran, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kelembagaan serta memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antaranggota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja BPP Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Kepala Sekretariat BPP Provinsi Papua Pegunungan, Anggota Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Produktif, Pokja Papua Polhukam Rekrutmen Tahun 2026
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	:	- Peningkatan pemahaman anggota Kelompok Kerja (Pokja) mengenai hak, kewajiban, tugas, fungsi, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. - Peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan, peran strategis, mekanisme kerja, serta hubungan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP). - Membangun kesamaan persepsi dan komitmen di antara anggota Pokja terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga dapat mendorong terciptanya koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi program kerja yang lebih efektif. - Memperkuat pemahaman mengenai pentingnya prinsip profesionalisme, integritas, disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Perlu dilakukan penguatan kapasitas anggota Pokja BPP secara berkelanjutan melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan teknis guna meningkatkan pemahaman terhadap tugas, fungsi, serta mekanisme kerja kelembagaan. Selain itu, diperlukan optimalisasi

		koordinasi dan komunikasi antar-Pokja untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program SHEK BPP.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Kelembagaan Bersama Kejaksaan Negeri Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Meningkatkan sinergi dan koordinasi kelembagaan antara Pokja Papua Cerdas dan Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua Pegunungan. • Memperkuat kolaborasi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan pendidikan karakter bagi masyarakat, khususnya generasi muda. • Mengidentifikasi peluang kerja sama program pendidikan, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung terwujudnya Papua yang cerdas, aman, dan berdaya saing
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten jayawijaya, BPP Pokja Polhukam, BPP Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	:	• Terjalin kesepahaman dan penguatan koordinasi antara Pokja Papua Cerdas dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia. • Tersedianya masukan dan informasi terkait penguatan pendidikan hukum serta pembinaan karakter bagi pelajar. • Teridentifikasinya peluang kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, edukasi

		masyarakat, dan peningkatan kesadaran hukum generasi muda. Adanya komitmen bersama untuk membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Sebagai tindak lanjut dari kegiatan koordinasi kelembagaan, perlu dilakukan penguatan sinergi antara Pokja Papua Cerdas dan Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui penyusunan program kerja sama yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum secara berkelanjutan bagi masyarakat dan pelajar guna meningkatkan kesadaran hukum serta mendukung pembangunan generasi muda yang cerdas dan berkarakter di Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Sosialisasi Bersama Wakil Rektor III Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, bertempat di Ruang Wakil Rektor III Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi bersama Wakil Rektor III Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pokja Papua Cerdas dengan perguruan tinggi dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua di bidang pendidikan tinggi. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan masukan terkait pelaksanaan program Otsus di lingkungan perguruan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP), serta mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia Papua yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan di Papua Pegunungan.

Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Jayawijaya, BPP Pokja Polhukam, BPP Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	:	Pentingnya optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di bidang pendidikan tinggi. Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi terkait pelaksanaan program pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP), termasuk dukungan beasiswa, pembinaan kemahasiswaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, teridentifikasi sejumlah tantangan dan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Pertemuan ini juga menghasilkan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi guna mendukung keberhasilan implementasi Otsus serta pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjuti	:	• Penguatan koordinasi antara Pokja Papua Cerdas dengan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena dalam rangka mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua di bidang pendidikan tinggi. • Diperlukan pemetaan lebih lanjut terhadap program-program yang didanai Otsus, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan akses, mutu, dan daya saing mahasiswa Orang Asli Papua (OAP). • Mendorong pengembangan program kolaboratif yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan mahasiswa, serta penyediaan data dan informasi yang mendukung perumusan kebijakan pembangunan pendidikan di Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Pokja Papua Cerdas Menghadiri Pembukaan Kegiatan UNA'IM Competition 2026
Pelaksanaan Kegiatan	:	Dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2026, bertempat di Lapangan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

(Waktu & Lokasi)		
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian dari proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. • Membangun karakter, disiplin, tanggung jawab, membangun semangat kebersamaan dan persaudaraan antar mahasiswa lintas Perguruan Tinggi. Membangun mental juara, meningkatkan rasa percaya diri, melatih kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, serta menghadapi tantangan secara positif di kalangan Mahasiswa.
Peserta Kegiatan	:	Peserta pada kegiatan ini yaitu Para Pimpinan UNAIM Yapis Wamena, Dosen, Perwakilan Kapolres Jayawijaya, Mahasiswa, Ketua SPPG Probinsi Papua Pegunungan, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Polhukam
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	:	• Pembukaan Kegiatan UNA'IM Competition 2026 berjalan baik dan lancar. Dalam penyampaian Wakil Rektor III Unaim Yapis Wamena bahwa dalam kegiatan tersebut dibuka berbagai cabang lomba akan digelar selama pelaksanaan Kompetisi UNA'IM, melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas di lingkungan Universitas Amal Ilmiah UNA'IM Yapis Wamena dan Perguruan Tinggi Lain Yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan antar mahasiswa, meningkatkan semangat kolaborasi, dan menumbuhkan budaya kampus yang sehat, aktif, serta produktif. • Penyelenggaraan Kompetisi UNA'IM sejalan dengan komitmen Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena dalam mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Komitmen tersebut juga sejalan dengan upaya kampus untuk mencetak lulusan yang memiliki keseimbangan antara prestasi akademik, keterampilan, kepemimpinan, dan karakter.
Rekomendasi/ Rencana Tindakanjnt	:	• Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi untuk memetakan program pengembangan kemahasiswaan yang didukung melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua. Selain itu, akan dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.

		Mendorong terselenggaranya kegiatan pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kompetisi mahasiswa lintas perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas, daya saing, dan semangat kolaborasi mahasiswa di Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan

Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M., Oliphina Rumbekwan,S.KM., M.Kes., Nizmawati Abd Rahim,SKM.,MKM

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Permohonan Data Penderita Kusta
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Senin, 08 Juni 2026 15.35 - 15.40 AM
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Koordinasi Anggota Pokja dengan dejabat/pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
Peserta Kegiatan	:	1. Pokja Papua Sehat Provinsi Papua Pegunungan 2. Kepala Dinas Kabupaten Jayawijaya 3. Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	A. Permohonan data kusta tahun 2023: 1. Distrik Kurulu, penderita Pausibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang, penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 2 orang. 2. Distrik Hom-Hom, penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang. 3. Distrik Wamena Kota, penderita Pausibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang, penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 2 orang, presentase perempuan 4 orang. 4. Distrik Walelagama, penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase perempuan 2 orang. B. Permohonan data kusta tahun 2024: 1. Distrik Kurulu, penderita Pausibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang, presentase perempuan 3 orang, penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 2 orang, presentase perempuan 1 orang. 2. Distrik Hubikosi, penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang. 3. Distrik Wamena Kota, penderita Pausibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 2 orang, presentase perempuan 1 orang. Penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang, presentase perempuan 1 orang. 4. Distrik Walelagama, penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase perempuan 1 orang. C. Permohonan data kusta tahun 2025:

		1. Distrik Kurulu, penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 3 orang, presentase perempuan 2 orang. 2. Distrik Hom-Hom, penderita Pausibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang. 3. Distrik Wamena Kota, penderita Pausibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang, penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 2 orang, presentase perempuan 4 orang. 4. Distrik Walelagama, penderita Pausibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 2 orang, presentase perempuan 3 orang. penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang, presentase perempuan 1 orang. D. Permohonan data kusta tahun 2026 (Januari - Mei): 1. Distrik Kurulu, penderita Pausibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang. Penderita Multibasiler usia >14 tahun dengan presentase laki-laki 1 orang. Distrik Wamena Kota, penderita Pausibasiler usia >14 tahun dengan presentase perempuan 2 orang.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Dari data tersebut diketahui bahwa terjadi fluktuatif kasus kusta di kabupaten Jayawijaya. Untuk itu, saran pelaksanaan kegiatan selanjutnya yakni: Saran untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam Penanggulangan Kusta 1. Meningkatkan penemuan kasus secara dini melalui skrining pada kelompok berisiko, investigasi kontak serumah, dan penguatan surveilans agar kasus dapat ditemukan sebelum terjadi kecacatan. 2. Memastikan ketersediaan dan kesinambungan pengobatan dengan menjamin stok obat multidrug therapy (MDT) serta sistem distribusi yang baik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkala mengenai deteksi dini, diagnosis, tata laksana, penanganan reaksi kusta, pencegahan kecacatan, dan konseling pasien. 4. Mengintensifkan promosi kesehatan dan edukasi masyarakat mengenai tanda dan gejala kusta, cara penularan, pentingnya pengobatan sampai tuntas, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang kusta. 5. Melaksanakan pelacakan dan pemeriksaan kontak serumah secara rutin serta memberikan tindak lanjut sesuai pedoman nasional untuk menemukan kasus baru sedini mungkin. 6. Memperkuat pemantauan kepatuhan berobat melalui kunjungan rumah, pengingat jadwal kontrol, dan pendampingan oleh petugas kesehatan atau kader agar pasien menyelesaikan pengobatan.

		7. Mengoptimalkan pencegahan kecacatan dengan pemeriksaan fungsi saraf secara berkala, edukasi perawatan diri (self-care), penyediaan alat pelindung bila diperlukan, serta rujukan fisioterapi atau rehabilitasi bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi. 8. Memperkuat sistem pencatatan, pelaporan, dan evaluasi program untuk memantau indikator seperti angka penemuan kasus baru, proporsi kecacatan derajat 2, angka putus berobat, serta keberhasilan pengobatan sebagai dasar perbaikan program. 9. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, institusi pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya edukasi, deteksi dini, dan pengurangan stigma. 10. Memastikan sistem rujukan yang efektif antara puskesmas dan rumah sakit rujukan bagi pasien dengan komplikasi, reaksi kusta berat, atau kecacatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Supervisi dan Pendampingan Lokus Scale Up ILP (Integrasi Layanan Primer) dan Komponen RSSH (Resilient and

		Sustainable Systems fo Health)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan 17 sampai 19 Juni 2026 09.30 - selesai
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Koordinasi Anggota Pokja dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
Peserta Kegiatan	:	1. Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan 2. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 4. Puskesmas Ilekma 5. Pustu Napua 6. Puskesmas Wamena Kota 7. Pustu Honelama 8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia The Global Fun
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Supervisi dan Pendampingan Kesiapan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan Dalam rangka mendukung percepatan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer, dilakukan kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan (SHEK) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesiapan implementasi ILP, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan ILP. Berdasarkan hasil desk monitoring, capaian implementasi ILP di Provinsi Papua Pegunungan masih sebesar 0%, sehingga diperlukan pendampingan secara intensif untuk mempercepat implementasi di seluruh puskesmas. Pelaksanaan ILP juga merupakan bagian dari upaya mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berkesinambungan. Dalam Hal ini, Tujuan Kunjungan Pokja Papua Sehat yakni: 1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya terkait percepatan implementasi ILP. 2. Menilai kesiapan puskesmas dalam melaksanakan ILP sesuai dengan klaster pelayanan. 3. Memberikan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan ILP. 4. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan pendanaan, sumber

	daya manusia, sarana prasarana, alat kesehatan, dan sistem informasi. 5. Menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk percepatan implementasi ILP. Lokasi Kunjungan: 1. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. 3. Puskesmas Ilekma, Kampung Napua. 4. Puskesmas Wamena Kota, Kampung Honelama. Peserta Pertemuan: 1. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan beserta staf. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya a) Kepala Dinas Kesehatan. b) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. c) Kepala Seksi KIA dan Gizi. d) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). e) Staf terkait. 3. Puskesmas a) Kepala Puskesmas. b) Penanggung jawab program ILP. c) Penanggung jawab masing-masing klaster pelayanan. d) Seluruh staf terkait pelaksanaan ILP. Hasil Pembahasan: 1. Disampaikan rencana pelaksanaan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan (SHEK) sebagai upaya menilai kesiapan implementasi ILP di Kabupaten Jayawijaya. 2. Berdasarkan hasil desk, capaian implementasi ILP di Provinsi Papua Pegunungan masih 0%, sehingga diperlukan percepatan implementasi melalui pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan. 3. Kabupaten Jayawijaya diprioritaskan sebagai lokasi awal implementasi ILP melalui dua puskesmas, yaitu Puskesmas Ilekma dan Puskesmas Wamena Kota. Kedua puskesmas tersebut ditetapkan sebagai pilot project implementasi ILP. 4. Keberhasilan implementasi di dua puskesmas diharapkan menjadi model (best practice) yang dapat direplikasi pada seluruh 28 puskesmas di 8 kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. 5. Implementasi ILP memerlukan dukungan lintas program dan lintas sektor, termasuk dukungan pendanaan melalui kerja sama dengan Global Fund untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan. 6. Kesiapan setiap klaster pelayanan di puskesmas perlu dipastikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat
--	--

		berjalan secara optimal sesuai standar pelayanan kesehatan primer. 7. Diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pendampingan agar seluruh petugas memahami konsep dan mekanisme pelaksanaan ILP. 8. Selain penguatan SDM, implementasi ILP memerlukan dukungan sarana prasarana, alat kesehatan, logistik, serta sistem informasi yang memadai. 9. Pendampingan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan ILP berjalan sesuai pedoman dan target yang telah ditetapkan. 10. Seluruh pihak berkomitmen mendukung percepatan transformasi layanan primer melalui implementasi ILP sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses. Kesimpulan: 1. Implementasi ILP di Provinsi Papua Pegunungan perlu segera dipercepat karena capaian pelaksanaannya masih 0%. 2. Kabupaten Jayawijaya menjadi prioritas pelaksanaan implementasi ILP melalui dua puskesmas sebagai pilot project. 3. Keberhasilan implementasi di Kabupaten Jayawijaya diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten lain di Provinsi Papua Pegunungan. 4. Keberhasilan implementasi ILP memerlukan dukungan pendanaan, SDM, sarana prasarana, alat kesehatan, sistem informasi, serta komitmen pemerintah daerah. Pendampingan, monitoring, dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan implementasi ILP berjalan sesuai ketentuan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Tindak Lanjut: 1. Melaksanakan pendampingan teknis secara berkala kepada dua puskesmas pilot project. 2. Menyusun rencana percepatan implementasi ILP di seluruh puskesmas Kabupaten Jayawijaya. 3. Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan SDM, alat kesehatan, sarana prasarana, serta dukungan pendanaan. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan implementasi ILP. 5. Menyiapkan replikasi implementasi ILP ke seluruh puskesmas di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil evaluasi pilot project di Kabupaten Jayawijaya. Rekomendasi Tindak Lanjut kepada Pemerintah Daerah: Berdasarkan hasil pendampingan dan supervisi kesiapan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kabupaten

	Jayawijaya, disampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sebagai berikut: 1. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar menetapkan percepatan implementasi ILP sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan daerah dalam rangka mendukung Transformasi Sistem Kesehatan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk mendukung implementasi ILP, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas, pengadaan alat kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, penyediaan transportasi pelayanan kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan di daerah yang sulit dijangkau. 3. Mengalokasikan pembiayaan yang memadai melalui APBD dan dana Otsus untuk mendukung operasional pelaksanaan ILP, termasuk kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi, pembinaan teknis, serta penguatan pelayanan kesehatan hingga tingkat kampung. 4. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di setiap puskesmas melalui rekrutmen, redistribusi, penempatan tenaga kesehatan, serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah dengan akses terbatas dengan memanfaatkan skema pembiayaan Otsus. 5. Memperkuat kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, orientasi, dan pendampingan berkelanjutan terkait implementasi ILP sehingga seluruh klaster pelayanan dapat berjalan secara optimal. 6. Mendorong sinergi lintas program, lintas sektor, serta kerja sama dengan mitra pembangunan, termasuk Global Fund dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mendukung percepatan implementasi ILP secara berkelanjutan. 7. Menjadikan dua puskesmas di Kabupaten Jayawijaya sebagai pilot project implementasi ILP, kemudian melakukan replikasi secara bertahap ke seluruh puskesmas di Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya ke seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan hasil evaluasi dan praktik baik (best practice). 8. Memperkuat fungsi pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk memastikan implementasi ILP berjalan sesuai standar pelayanan dan target yang telah ditetapkan. 9. Memanfaatkan kewenangan khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua untuk mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan primer, khususnya bagi masyarakat Orang Asli
--	---

	Papua (OAP) dan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan, terpencil, serta sulit dijangkau. 10. Menyusun peta jalan (roadmap) percepatan implementasi ILP di Provinsi Papua Pegunungan yang didukung oleh komitmen pendanaan melalui APBD, Dana Otsus, serta sumber pembiayaan lainnya, sehingga target implementasi ILP di seluruh puskesmas dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menekankan bahwa Dana Otonomi Khusus bukan hanya sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan primer, dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan transformasi kesehatan di Tanah Papua. Dengan demikian, implementasi ILP dapat menjadi salah satu program prioritas yang didukung secara berkelanjutan melalui kebijakan Otsus.
Dokumentasi Kegiatan	: 



Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Undangan Sosialisasi Program Layanan Prioritas, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Hotel Baliem Pilamo 26 Juni 2026 12.00 - selesai
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan Sinkronisasi, dan Harmonisasi
Peserta Kegiatan	:	A. Kementerian Kesehatan 1. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan 2. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan B. Rumah Sakit Vertikal 1. Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais (4 orang) 2. Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (2 orang) 3. Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta (2 orang) 4. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (2 orang) 5. Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita (3 orang) 6. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta (2 orang) 7. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado (1 orang) 8. Direktur Utama RSJ Dr. H. Marzuki Mahdi Bogor (1 orang) 9. Direktur Utama RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta (2 orang) 10. Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung (2 orang)

		11. Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan (2 orang) C. Rumah Sakit Daerah 1. Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo (2 orang) 2. Direktur Utama Rumah Sakit Mata Bali Mandara (2 orang) 3. Direktur RSUD Jayapura (1 orang) 4. Direktur RSUD Wamena (2 orang) 5. Direktur RSUD Dekai (2 orang) 6. Direktur RSUD Karubaga (2 orang) 7. Direktur RSUD Tiom (2 orang) 8. Direktur RSUD Oksibil (2 orang) 9. Direktur Rumah Sakit Pratama Elvrida Sara (2 orang) 10. Direktur RSUD Lukas Enembe Kabupaten Mamberamo Tengah (2 orang) 11. Direktur RSUD Er Dabi (2 orang) D. Dinas Kesehatan 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan (17 orang) 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya (1 orang) 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo (1 orang) 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolikara (1 orang) 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya (1 orang) 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang (1 orang) 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga (1 orang) 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah (1 orang) 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo (1 orang) Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	A. Sambutan Perwakilan Rumah Sakit Koordinator dr. Erniati, Sp.KJ., M.Sc., MMR Dalam sambutannya disampaikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia merupakan satu bangsa yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang setara tanpa memandang wilayah tempat tinggal. Kerja sama pengampunan rumah sakit ini merupakan bagian dari implementasi Transformasi Sistem Kesehatan nasional serta menjadi forum koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan rumah sakit pengampu.

	Pengampuan akan difokuskan pada 11 layanan prioritas, yang diawali dengan asesmen dan pendampingan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Wamena serta rumah sakit lainnya di Papua Pegunungan untuk menilai kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, dan pelayanan yang tersedia. Kolaborasi juga akan melibatkan sejumlah rumah sakit di Papua Pegunungan, antara lain RSUD Wamena, RSUD Karubaga, RSUD Dekai, RSUD Lukas Enembe, dan rumah sakit lainnya. Rumah Sakit Kanker Dharmas hadir sebagai salah satu rumah sakit pengampu nasional untuk layanan kanker. Disampaikan pula bahwa Indonesia mencatat sekitar 408.000 kasus kanker baru setiap tahun dengan angka kematian yang masih tinggi. Beban pembiayaan pelayanan kanker melalui JKN mencapai sekitar Rp5,9 triliun pada tahun 2023. Beliau menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari transformasi pelayanan kesehatan jangka panjang di Papua Pegunungan yang memerlukan komitmen seluruh pihak. B. Sambutan Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dr. Ghotamar Erlangga, SKM, MKM Beliau berharap penandatanganan MoU menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan. Menurutnya, seluruh masyarakat Indonesia harus memperoleh pelayanan kesehatan yang sama baiknya. Dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan, tujuh rumah sakit direncanakan meningkat dari Rumah Sakit Kelas D menjadi Kelas C, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas tempat tidur, tetapi juga kemampuan memberikan pelayanan spesialisasi seperti layanan jantung, stroke, kanker, kesehatan ibu dan anak, serta layanan prioritas lainnya. Penguatan rumah sakit daerah diharapkan menjadi dasar peningkatan layanan sehingga sebagian besar pasien dapat ditangani di RSUD masing-masing tanpa harus dirujuk ke provinsi lain. Beliau juga mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan putra-putri asli daerah mengikuti pendidikan tenaga kesehatan dan dokter spesialis sehingga keberlanjutan pelayanan dapat terjaga. Kementerian Kesehatan akan terus berupaya memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, serta alat kesehatan guna mendukung peningkatan pelayanan di Papua Pegunungan. C. Sambutan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan dr. Ombin Parulian, M.Kes Beliau menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan pelayanan kesehatan, padahal konstitusi mengamankan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang setara. Terdapat tiga tantangan utama yang
--	--

	harus diatasi, yaitu: Akses pelayanan kesehatan, Mutu layanan kesehatan. Dan Keterjangkauan pelayanan kesehatan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan melaksanakan transformasi sistem kesehatan secara menyeluruh melalui penguatan jejaring pengampuan layanan kesehatan. Melalui jejaring ini, rumah sakit vertikal nasional akan menjadi rumah sakit pengampu bagi rumah sakit daerah sehingga pelayanan spesialisistik dapat diberikan lebih dekat kepada masyarakat, termasuk di kabupaten-kabupaten seperti Yahukimo dan wilayah lain di Papua Pegunungan. Dalam roadmap hingga tahun 2027, rumah sakit di Papua Pegunungan akan dilengkapi dengan sarana, prasarana, alat kesehatan, serta sumber daya manusia sehingga mampu memberikan pelayanan spesialisistik tingkat madya tanpa harus merujuk pasien ke rumah sakit provinsi. Beliau menegaskan bahwa pasien yang sebenarnya dapat ditangani di rumah sakit kabupaten seharusnya tidak perlu dirujuk ke rumah sakit provinsi agar pelayanan lebih efektif dan rumah sakit rujukan tidak mengalami penumpukan pasien. Menurut data Kementerian Kesehatan, beberapa rumah sakit di Papua Pegunungan telah menjadi lokasi prioritas pembangunan pelayanan kesehatan dan akan mendapatkan dukungan secara bertahap hingga tahun 2027. Beliau juga menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada gedung dan alat kesehatan, tetapi juga pada penyediaan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan menyiapkan berbagai skema pendidikan dokter spesialis, termasuk program afirmasi bagi putra-putri daerah dengan syarat mereka berkomitmen kembali mengabdikan di daerah asal dan pemerintah daerah turut menjaga keberlangsungan penugasannya. Beliau berharap seluruh pihak dapat mengawal implementasi kerja sama ini karena penandatanganan MoU hanyalah tahap awal yang harus dilanjutkan dengan komitmen pelaksanaan, kolaborasi, dan evaluasi secara berkelanjutan. D. Sambutan Gubernur Papua Pegunungan Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan, rumah sakit vertikal, pemerintah kabupaten, dan seluruh pihak yang telah mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan. Beliau berharap kerja sama melalui jejaring pengampuan rumah sakit dapat mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas rumah sakit daerah, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, serta memberikan akses layanan yang lebih mudah bagi masyarakat. Gubernur juga berharap masyarakat Papua Pegunungan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan spesialisistik karena layanan tersebut secara bertahap dapat tersedia di rumah sakit kabupaten.
--	--

		Di akhir sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen mendukung implementasi kerja sama ini sehingga mampu mendorong kemajuan sektor kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua Pegunungan secara berkelanjutan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan 1. Mengawal implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan, rumah sakit vertikal, pemerintah daerah, dan rumah sakit di Papua Pegunungan agar ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur beserta target waktu pelaksanaannya. 2. Memfasilitasi koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten, Dinas Kesehatan, rumah sakit pengampu, dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pelaksanaan program pengampunan berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah. 3. Mendorong percepatan peningkatan kelas RSUD di Papua Pegunungan, khususnya rumah sakit yang ditargetkan naik dari Kelas D menjadi Kelas C, melalui pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia. 4. Mengawal pemenuhan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan tenaga kesehatan strategis, termasuk mendorong pemberian insentif, retensi, dan pengembangan karier bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Papua Pegunungan. 5. Mendorong pemerintah daerah menyiapkan putra-putri asli Papua Pegunungan untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya melalui skema afirmasi Kementerian Kesehatan, dengan komitmen kembali mengabdikan di daerah asal. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan jejaring pengampunan rumah sakit, termasuk capaian pengembangan 11 layanan prioritas, peningkatan kompetensi SDM, dan pemanfaatan sarana-prasarana yang telah disediakan. 7. Mendorong penguatan sistem rujukan berjenjang sehingga pelayanan spesialistik dapat diselesaikan di rumah sakit kabupaten sesuai kompetensinya, sehingga mengurangi rujukan ke rumah sakit provinsi maupun ke luar Papua. 8. Menyusun forum koordinasi rutin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi progres implementasi, mengidentifikasi kendala, dan menyusun langkah percepatan penyelesaian permasalahan di lapangan. 9. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kementerian Kesehatan sebagai bahan pengambilan kebijakan serta percepatan pembangunan layanan

		kesehatan di wilayah Papua Pegunungan. Rekomendasi tersebut sejalan dengan peran BP3OKP sebagai lembaga yang melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program strategis Otonomi Khusus Papua, khususnya dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	



Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Workshop Satu Data Pendataan Kependudukan Orang Asli Papua (OAP) Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 2–3 Juni 2026, bertempat di Ruang Rapat Grand Baliem Hotel, Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mempercepat pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang berjumlah lebih dari 1.300.000 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 1.484.000 jiwa, yang belum direkam secara terpisah sebagai penduduk OAP ke dalam Data SIAK Plus, dengan cakupan 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Pendataan ini akan memengaruhi alokasi penganggaran biaya pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber 1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. 2. Konsultan SKALA Indonesia. 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. Peserta 1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan. 2. Kepala Bapperida beserta staf. 3. Kepala dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. 4. Kepala Dinas beserta staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 8 kabupaten. 5. Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan diwakili Pokja Papua Sehat Gaad Piranid Tabuni.

		6. Anggota MRP dan DPRD Provinsi Papua Pegunungan. 7. Kepala dinas beserta staf instansi terkait.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Dukungan sosialisasi dan kontribusi peran Anggota BP3OKP dalam percepatan pelaksanaan perekaman data SIAK Plus bagi OAP Provinsi Papua Pegunungan sebagai subjek dan objek utama yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan kenaikan nilai alokasi penganggaran Dana Otonomi Khusus Papua. Keikutsertaan Anggota BP3OKP bersama peserta workshop selama 2 (dua) hari menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyampaian materi oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 2. Penyampaian metode dan teknik pendataan SIAK Plus oleh Konsultan SKALA Indonesia. 3. Diskusi panel mengenai laporan pendataan OAP dari 8 kabupaten. 4. Perumusan hasil diskusi dan penyusunan rumusan hasil workshop. 5. Penetapan langkah kerja serta komitmen batas waktu pelaksanaan perekaman SIAK Plus di 8 kabupaten hingga tanggal 8 Agustus 2026. 6. Sebagai kesimpulan workshop, disepakati bahwa hasil pendataan dan perekaman SIAK Plus Tahun 2026 akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sebagai dasar rujukan dalam proses penyusunan Perdasi dan Perdatus melalui mekanisme pembahasan bersama MRP, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun 2028. 7. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh pejabat yang berwenang bersama Anggota BP3OKP.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	Petunjuk pelaksanaan berdasarkan arahan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

		1. Pelaksanaan pendataan dan perekaman SIAK Plus dimulai pada tanggal 4 Juni sampai dengan 8 Agustus 2028. 2. Pendampingan dan koordinasi secara intensif oleh Pemerintah Provinsi, BP3OKP, MRP, dan DPRP. 3. Penanggung jawab pelaksanaan di lapangan adalah Bupati pada 8 kabupaten. 4. Sebelum tanggal 8 Agustus 2027, hasil pendataan dan perekaman SIAK Plus disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Pendataan dan Penanganan Penyakit Kusta pada Cakupan 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025–2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026, bertempat di Ruang Kerja Kepala Bidang P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mendapatkan penjelasan mengenai data jumlah penderita penyakit kusta beserta penanganan pengobatannya, serta memperoleh arahan dan solusi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi dalam penanganan penyakit kusta dan kebijakan perencanaannya dari Sekretaris Dinas Kesehatan.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber - Bapak Simon Siauta, Kasubbid P2M Bidang P2P. Peserta - Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi. - Kasubbid P2M, Bapak Simon Siauta. - Staf Subbid P2M (1 orang). Anggota Pokja Papua Sehat, Saudara Gaad P. Tabuni.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	- Pendataan jumlah penderita penyakit kusta pada 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. - Pengarahan percepatan pelaksanaan pengobatan penyakit kusta. - Pemberian arahan dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penanganan penyakit kusta. Hasil koordinasi yang diperoleh sebagai berikut: - Diperoleh laporan data penderita yang tercatat sebanyak 37 kasus, terdiri atas: Kabupaten Jayawijaya sebanyak 30 kasus, Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 2 kasus, Kabupaten Mamberamo Tengah sebanyak 5 kasus, dan Kabupaten Tolikara sebanyak 1 kasus dengan status <i>visitor</i> dari Jayapura. - Bantuan pengobatan berasal dari program pemerintah pusat dan telah/sedang disalurkan melalui Kasubbid P2M Bidang P2P, Bapak Simon Siauta. - Perhatian pemerintah daerah terhadap pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan masih sangat terbatas. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pada 8 kabupaten. - Penanganan penyakit kusta belum berjalan secara maksimal sehingga diduga masih banyak penderita

		yang belum terdata dan belum mendapatkan penanganan di wilayah 8 kabupaten. 5. Diharapkan Anggota Pokja Papua Sehat dapat memberikan kontribusi dalam mendorong penanganan kasus penyakit kusta, baik di tingkat Gubernur maupun Pemerintah Pusat.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Melaksanakan audiensi dan koordinasi BP3OKP bersama Gubernur serta pemerintah pada 8 kabupaten guna membahas strategi dan kebijakan penanganan penyakit kusta. 2. Menyusun laporan resmi mengenai data dan rencana penanganan untuk disampaikan kepada Sekretariat Wakil Presiden sesuai dengan surat edaran yang telah disampaikan kepada Anggota BPP dan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan. 3. Membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas di tingkat kabupaten melalui SHEK sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai anggota pengarah BPP dan Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan. 4. Membentuk grup WhatsApp sebagai wadah koordinasi dan komunikasi.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Rapat Pertemuan dengan Agenda Perkenalan 6 Anggota Pokja BP3OKP Hasil Rekrutmen Tahun 2026 serta Pengarahan Penugasan dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan di BP3OKP
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2026, bertempat di Ruang Rapat BPP Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan perkenalan antara Anggota Pokja BP3OKP yang telah bertugas sebelumnya bersama Admin Sekretariat BP3OKP, Kepala KPPN Wamena, dan Sekretaris BPP dengan 6 Anggota Pokja BP3OKP hasil rekrutmen Tahun 2026, serta memberikan penjelasan mengenai garis besar tugas dan fungsi (tusi) serta manajemen administrasi BP3OKP
Peserta Kegiatan	:	Narasumber 1. Kepala KPPN Wamena. 2. Sekretaris KPPN dan BPP Wamena. 3. Anggota Pokja Papua Sehat dan Pokja Papua Polhukam. Peserta 1. Kepala KPPN Wamena. 2. Sekretaris KPPN dan BPP Wamena. 3. Anggota Pokja Papua Sehat dan Pokja Papua Polhukam. 4. Enam Anggota Pokja BP3OKP yang baru. 5. Admin Sekretariat BP3OKP.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Penyambutan dan pemberian arahan mengenai pengalaman kerja kepada anggota Pokja baru, serta penyampaian tanggapan atas berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Pokja BP3OKP yang baru. Hasil kegiatan sebagai berikut: 1. Terlaksana forum rapat resmi dengan agenda penerimaan dan perkenalan 6 Anggota Pokja BP3OKP yang baru, terdiri atas: - o 1 orang Anggota Pokja Papua Produktif; - o 1 orang Anggota Pokja Papua Cerdas; - o 2 orang Anggota Pokja Papua Polhukam; dan - o 2 orang Anggota Pokja Papua Sehat.

		2. Perkenalan diawali oleh Anggota Pokja BP3OKP yang telah bertugas sebelumnya, dilanjutkan dengan Kepala KPPN Wamena, Sekretaris KPPN/BPP Provinsi Papua Pegunungan, serta Admin Sekretariat BPP. Selanjutnya, masing-masing dari 6 Anggota Pokja BP3OKP yang baru memperkenalkan diri. 3. Kepala Sekretariat BPP memberikan pengarahan mengenai sistem pengelolaan organisasi, disiplin kerja, serta administrasi kegiatan. 4. Kepala KPPN Wamena memberikan pengarahan secara umum mengenai tugas dan fungsi, serta tanggung jawab pengelolaan yang menjadi kewenangan Pengarah BPP dan Anggota Pokja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Rapat koordinasi dan pengawasan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, baik atas permintaan maupun sesuai kebutuhan organisasi. 2. Koordinasi kerja dan penerapan disiplin akan terus ditegakkan serta dilakukan pemantauan secara berkala. 3. Komunikasi dan koordinasi menjadi prioritas utama dalam mendukung pelaksanaan tugas ke depan. 4. Penyusunan rencana kerja dan laporan kinerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap bulan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Pembahasan Prioritas Kebijakan Pembiayaan Pendidikan SDM Orang Asli Papua (OAP) Bidang Kesehatan pada Program S1, S2, dan S3 Tahun 2026–2027
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2026, bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Dukungan pembiayaan mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) yang menempuh pendidikan bidang kesehatan pada program S1, S2, dan S3 Tahun Akademik 2026–2027. 2. Perhatian dan dukungan kebijakan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Elisa Gobay Wamena sesuai arahan Gubernur.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber • Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan. Peserta 1. Bapak Simon Sembor – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan. 2. Gaad P. Tabuni – Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Melaksanakan koordinasi terkait perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam perencanaan implementasi pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa OAP Tahun Akademik 2026–2027. Hasil kegiatan sebagai berikut: 1. Terlaksana koordinasi yang berfokus pada pembiayaan pendidikan bidang kesehatan bagi mahasiswa OAP. Mahasiswa yang telah terdaftar akan tetap memperoleh pembiayaan sesuai ketentuan, sedangkan mahasiswa yang belum terdaftar akan diupayakan memperoleh pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan data yang tersedia, dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat. 2. SMK Kesehatan Elisa Gobay Wamena berpeluang memperoleh dukungan pembangunan sarana dan prasarana gedung sekolah. Untuk mendukung proses tersebut diperlukan data perencanaan yang dituangkan dalam bentuk proposal.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Melaksanakan koordinasi lanjutan (SHEK) bersama Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan mengenai pendataan mahasiswa OAP secara by name by

		address yang memperoleh pembiayaan dari Dana Otonomi Khusus. 2. Mendorong penyiapan dan penyampaian proposal pembangunan gedung SMK Kesehatan Elisa Gobay Wamena.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 8		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan SHEK Anggota Pokja Papua Sehat dalam Rencana Kerja Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dan Aksi Implementasinya Tahun 2026–2027
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2026, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam implementasi aksi kerja berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2026–2027.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber • Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. Peserta 1. Bapak Jena Baskossay – Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. 2. Gaad P. Tabuni – Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat

Hasil Kegiatan	:	Koordinasi dan pengarahan difokuskan pada pelaksanaan kegiatan, meliputi sasaran kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan, target pencapaian, serta pembiayaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan sumber pendanaan lainnya melalui dukungan sumber daya manusia yang berkompeten. Hasil kegiatan sebagai berikut: 1. Terlaksana pertemuan dengan Sekretaris Dinas Kesehatan yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan untuk menerima kunjungan Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP serta melaksanakan koordinasi. 2. Disampaikan beberapa kondisi yang sedang dibenahi sehubungan dengan pergantian Kepala Dinas Kesehatan yang baru, antara lain: a. Penataan kantor dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan struktur organisasi. b. Melanjutkan pengelolaan manajemen perencanaan program kerja dan anggaran. c. Pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan serta manajemen RSUD Wamena dan Puskesmas pada 40 distrik. d. Data mengenai jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan akan disampaikan kemudian. 3. Disampaikan bahwa data mengenai pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, khususnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), akan diberikan secara tertulis pada kesempatan berikutnya.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Berkomitmen untuk melaksanakan pertemuan yang lebih intensif dengan Kepala Dinas Kesehatan beserta para kepala bidang dan staf. 2. Menyiapkan data sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten, RSUD, dan Puskesmas di 40 distrik. 3. Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP akan didukung dengan penyediaan data kasus penyakit yang dominan, beserta lokasi penyebaran terbanyak sebagai bahan analisis dan perencanaan.

Dokumentasi Kegiatan	:		
----------------------	---	--	--

Kegiatan 9			
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Koordinasi Percepatan Aksi Implementasi Pendataan Penduduk Orang Asli Papua (OAP) melalui Perekaman SIAK Plus di Kabupaten Jayawijaya	
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Senin, 15 Juni 2026, bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mempercepat pendataan penduduk Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Jayawijaya melalui perekaman SIAK Plus, sesuai arahan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan kepada Anggota Pokja BP3OKP untuk melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap rencana serta pelaksanaan perekaman data SIAK Plus di tingkat provinsi dan 8 kabupaten hingga batas waktu tanggal 8 Agustus 2026.	
Peserta Kegiatan	:	Narasumber - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya. Peserta - Bapak Penius Lany – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya. - Gaad P. Tabuni – Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP (mewakili Anggota Pengarah BPP).	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK	
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat	
Hasil Kegiatan	:	Sesuai arahan Gubernur, Anggota BP3OKP bersama Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Anggota MRP dan DPRP, melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan OAP melalui perekaman SIAK Plus pada Dinas	

		Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi maupun 8 kabupaten. Hasil koordinasi sebagai berikut: 1. Anggota BP3OKP menyosialisasikan tugas dan fungsi (tusi) serta peran SHEK Anggota BP3OKP di tingkat provinsi dan kabupaten dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua, khususnya keterlibatan dalam pendataan OAP melalui perekaman SIAK Plus sesuai arahan Gubernur. 2. Kepala Dinas menjelaskan kesiapan dan strategi pelaksanaan pendataan dan perekaman SIAK Plus, yaitu: a. Bulan Juni 2026: Persiapan kegiatan di kantor, konsultasi dengan Bupati, serta membangun koordinasi dan komunikasi dengan 40 kepala distrik dan 328 kampung. b. Bulan Juli 2026: Pelaksanaan perekaman SIAK Plus melalui kegiatan petugas yang turun langsung ke distrik dan kampung. 3. Data yang akan direkam dalam SIAK Plus berasal dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 276.288 jiwa, yang selanjutnya akan dipisahkan dan direkam secara khusus sebagai data Orang Asli Papua (OAP). 4. Kepala Dinas menyerahkan laporan hasil rekapitulasi rincian pendataan penduduk umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 kepada Anggota BP3OKP sebagai bahan koordinasi dan dokumentasi (terlampir).
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pendataan dan perekaman SIAK Plus di Kabupaten Jayawijaya. 2. Mendorong percepatan pelaksanaan perekaman data OAP sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta para kepala distrik guna memastikan pencapaian target pendataan.

		4. Menindaklanjuti hasil laporan rekapitulasi pendataan penduduk sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK Plus.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 10		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Acara Launching Noken Cenderawasih dan Pameran/Penjualan Hasil Karya Kelompok UMKM Masyarakat pada 9 Distrik Kabupaten Jayawijaya di Kampung Tekani, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari 24 Juni 2026, bertempat di Halaman Kampung Tekani, Distrik Yalengga, Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menghadiri undangan dan menyaksikan pelaksanaan Launching Noken Cenderawasih serta pameran hasil karya kelompok UMKM masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi (tusi) Anggota Pokja Papua Produktif yang bersifat wajib dalam pelaksanaan SHEK guna mendukung pengembangan usaha masyarakat.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber 1. Utusan Direktorat Jenderal UMKM. 2. Bupati Jayawijaya. 3. Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Peserta 1. Para tamu undangan VIP. 2. Pemerintah Kabupaten, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. 3. Masyarakat dari 9 distrik.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat

Hasil Kegiatan	:	1. Terlaksana pembukaan selubung papan nama Kelompok UMKM. 2. Dilaksanakan penanaman bibit kopi secara simbolis di lahan kelompok UMKM. 3. Dilaksanakan peninjauan terhadap 15 stan pameran yang menampilkan berbagai hasil karya dan produk anggota UMKM, termasuk hasil kerajinan Noken Cenderawasih yang dihasilkan oleh kelompok ibu-ibu. Produk tersebut telah memperoleh pengakuan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Papua. 4. Bupati Jayawijaya mendeklarasikan bahwa Kampung Tekani akan ditingkatkan menjadi calon distrik sebagai hasil pemekaran dari Distrik Yalengga.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan SHEK oleh Anggota Pokja Papua Produktif bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam pengembangan usaha kelompok UMKM masyarakat pada 9 distrik. 2. Direktorat Jenderal UMKM berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM masyarakat.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 11		
Nama Kegiatan	:	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Rencana Kerja Triwulan III Tahun 2026 Internal Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2026, bertempat di Ruang Kerja Anggota Pokja Papua Sehat, Kantor BP3OKP

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mendiskusikan, membahas, dan menyusun Rencana Kerja/Kegiatan Anggota Pokja Papua Sehat untuk Triwulan III Tahun 2026.
Peserta Kegiatan	:	Narasumber 1. Kepala KPPN Wamena. 2. Sekretaris KPPN/BPP. 3. Gaad P. Tabuni – Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP (anggota lama). Peserta 1. Gaad P. Tabuni – Anggota Pokja Papua Sehat (anggota lama). 2. Oliphina Rumbekwan – Anggota Pokja Papua Sehat (anggota baru). 3. Nizmawati Abd. Rahim – Anggota Pokja Papua Sehat (anggota baru).
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Melaksanakan diskusi dan pembahasan untuk menentukan topik kegiatan, menyusun rencana kerja, serta menetapkan sasaran, waktu, dan lokasi pelaksanaan kegiatan. Hasil penyusunan rencana kerja akan disampaikan secara tertulis pada awal minggu pertama bulan Juli 2026. Hasil kegiatan sebagai berikut: 1. Terlaksana rapat diskusi dan pembahasan penyusunan rancangan rencana kerja/kegiatan internal Anggota Pokja Papua Sehat yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu pada tanggal 23–26 Juni 2026. 2. Telah disusun rencana kerja selama 3 (tiga) hari, yaitu pada tanggal 29–30 Juni 2026, untuk pelaksanaan kegiatan Triwulan III (Juli–September) Tahun 2026 sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri atas 4 kegiatan rutin dan 12 kegiatan sesuai tugas dan fungsi SHEK Pokja Papua Sehat. 3. Hasil penyusunan rencana kerja akan diserahkan kepada Staf Admin Sekretariat BPP pada tanggal 3 Juli 2026.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	Melaksanakan implementasi rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan topik, sasaran, waktu, serta lokasi yang telah direncanakan pada Triwulan III Tahun 2026.

Dokumentasi Kegiatan	:	
-----------------------------	----------	--

BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

**Wamena, 8 Juli 2025
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

HANTOR MATUAN, S.IP

